

**KONSTRUKSI REALITAS PERAN KPK
DALAM PEMBERITAAN *ONLINE* TERKAIT KASUS KORUPSI
(Studi *Framing* Beberapa Pemberitaan *Online* Terkait Peran KPK
pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah)**

***THE REALITY CONSTRUCTION OF KPK ROLE
IN ONLINE NEWS REGARDING CORRUPTION CASES
(Framing study in Online News about KPK Role
In the case of corruption of Banten province ex-governor, Ratu Atut Chosiah)***

Parulian Sitompul

Peneliti pada BPPKI Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI
(Naskah diterima melalui email tgl 8 September 2014, diperiksa mitra bestari Oktober 2014,
direvisi November 2014, disetujui terbit Desember 2014)

ABSTRACT

This article presents the construction of KPK role in online news regarding corruption case. Frame model used is the one introduced by Robert Entmant. The research shows that there are two main construction in three online news. First, militancy of KPK, and its role as opposition towards illegal power of government. Second, frame of KPK as anti-elite organizations. It makes up KPK role in the eradication of corruption conducted by elites. Theoretically, research should be conducted to analyze news about KPK because of plentifulness of corruption cases. Practically, media should support news about the truth. News about corruption should not be exclusively constructed or oppose law or universal justice.

Key words : Reality Construction; online news; Framing.

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang konstruksirealitas peran KPK dalam pemberitaan online terkait kasus korupsi. Framing Robert Entmant dipakai sebagai perangkat pengumpulan data pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat dua konstruksi utama dalam ketiga berita online. Pertama konstruksi bingkai militansi KPK, peran KPK sebagai opsi oposisi terhadap kekuatan penguasa atau pemerintah yang bergerak tidak pada nilai proses hukum tetapi pada nilai-nilai universal demokrasi. Kedua, konstruksi bingkai KPK sebagai organisasi anti elitis, ini merupakan konstruksi peran KPK sebagai bentuk perlawanannya kepada korupsi yang memang merupakan perilaku elite. Secara teoritis perlu dilakukan kajian wacana lebih dalam terkait pemberitaan tentang KPK, mengingat kasus yang banyak dan bergulir. Secara praktis bahwa media sebaiknya memberikan pemberitaan yang mendukung kebenaran. Dimana pemberitaan tentang korupsi jangan dijadikan sebuah konstruksi elitis ataupun konstruksi yang membangun opini tertentu yang menonjolkan sisi berlawanan dengan pengakuan hukum atau keadilan universal.

Kata-kata kunci : Konstruksi Realitas; Berita Online; Framing.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah merupakan kasus populer di sepanjang tahun 2014 ini. Atut didakwa atas penyuaipan Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mempengaruhi putusan sengketa pemilihan Kepala Daerah di Lebak, Banten. Terbongkarnya kasus Atut ini tidak lepas dari peran KPK sebagai lembaga publik yang mengawasi dan mengadvokasi serta melakukan perlawanan pada pidana korupsi yang merebak di Indonesia. Indonesia sebagai Negara korupsi memiliki peringkat ke-114. Organisasi nonprofit yang memiliki perhatian khusus dan kerap melakukan survei soal korupsi, Transparansi Internasional (TI) baru-baru ini mengeluarkan daftar terbaru indeks persepsi korupsi tahun 2013, hasilnya Afghanistan, Korea Utara dan Somalia menjadi tiga negara terkorup tahun ini. Dan berdasarkan tabel yang dimuat di situs resmi TI, Indonesia berada di posisi ke-114 dengan indeks persepsi 32. Laman *News Corporated Australia*, Rabu 4 Desember 2013, melansir bahwa posisi Indonesia masih lebih baik ketimbang peringkat Rusia yang duduk di posisi 127 dengan indeks persepsi 28 (dunia.news.viva.co.id).

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada tanggal 25 November, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK sebagai lembaga yang menangani masalah korupsi ini merupakan objek dari sortan media terutama dalam kasus Atut ini, dimana peran KPK yang mampu menyeret orang nomor satu Banten ini ke pengadilan memiliki sebuah kontroversi tertentu. Usaha KPK dalam menegakkan keadilan terkait dengan pengakuan hukum terhadap para koruptor adalah tugas sosial yang harus didukung.

Media seyogyanya berdiri sebagai *watch dog* terhadap keadaan di ruang publik. Dimana media dalam garis besarnya adalah sebuah institusi yang harus bersandar pada pilar utama kebenaran (Kovach dan Rosentiel 2004, 38). Penegakan hukum adalah pengakuan kebenaran itu sendiri, jadi secara normatif media wajib berada dibelakangnya. Kasus Atut vs KPK ini merupakan kasus yang banyak diframe oleh media. Media memilikipandangan berbeda tentang kasus ini.

Media dan regularitasnya adalah sebuah usaha mengkonstruksi realitas, dimana media menyajikan sebuah pengetahuan bagi manusia dimana menurut Berger dan Luckmann realitas dalam pengetahuan adalah sebuahrealitas yang dikonstruksi secara sosial (Berger dan Luckmann 1979, 211). Dari pandangan ini, maka peran KPK dan media massa adalah sebuah peran yang dikonstruksi oleh regularitas dan aktivitas media yang dihasilkan dari interaksi objektifikasi dan internalisasi sosial. Sehingga secara spesifik atau dan KPK berubah menjadi sebuah sosokyang realitasnya adalah realitas dalam media massa.

Banyakrealitas media massa bukanlah sebuah realitas yang dengan begitu saja ada—setidaknya menurut pandangan Berger dan Luckmann. Tetapi sebuah bentukan yang dihasilkan oleh kesadaran tertentu yang menyajikankeberadaan objek dengan intens tertentu dalamkonstruksinya.

Kontroversi peran KPK dalam kasus Atutterindikasi adalah sebuah konstruksi realitas dimana bahasa media memainkan peranan penting untuk mengadakan atau mengeksekusi peran KPK dalam kenyataan sosial. Dalam konteks pengakuan hukum dan konteks kebenaran media, maka konstruksi media seyogyanya mendukung KPK. Tapi media mungkin berkata lain karena media sendiri merupakan institusi sosial yang didalamnya ada proses sosial yang diakhiri dengan konstruksi bahasaitu sendiri, sehingga peran KPK adalah bagaimana peran media mebahasakannya.

Bahasa media dalam pemberitaan kasusAtut perlu dicermati sebagai sebuah konstruksi, dimana kebenaran yang diusung KPK tentu secara normatif harus sesuai dengan media namun, dalam perkembangannya sekali lagi media adalah sebuah konstruksi. Sehingga perlu dilihat konstruksi seperti apa danbagaimana pembingkaiian media terhadap peran KPK itu terjadi. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut :Bagaimana peran KPK dikonstruksikan dalam pemberitaan media *online*?

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Sosial dan Media Massa

Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin 2008, 203).

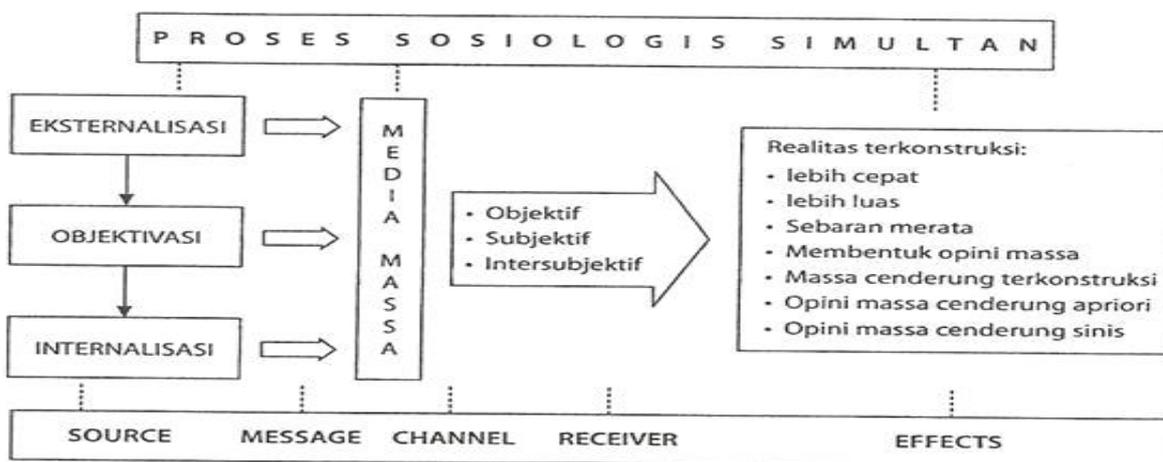
Mengingat sifat dan fakta pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Jadi dapat disimpulkan, seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna.

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik, misalnya saja, sebuah liputan mengenai kegiatan orang yang berkumpul di sebuah lapangan terbuka untuk mendengarkan pidato-pidato politik pada musim pemilu adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang lazim disebut kampanye pemilu itu.

Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan (Bungin 2008, 192). Bagi kaum konstruktivisme, realitas (berita) itu hadir dalam keadaan subjektif. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang dan ideologi wartawan. Dapat disimpulkan, manusialah yang membentuk imaji dunia. Sebuah teks dalam sebuah berita tidak dapat disamakan sebagai cerminan dari realitas, tetapi ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas.

Menurut Burhan Bungin (2008, 194), substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa. Posisi konstruksi sosial media massa adalah sebagai koreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas realitas” dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efeknya.

Gambar 1 :
Proses Konstruksi Sosial Media Massa



Sumber: Burhan Bungin 2008, 195

Dalam perspektif ini, tahapan-tahapan proses konstruksi sosial media massa terjadi melalui: tahap menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran konstruksi; tahap pembentukan konstruksi; tahap konfirmasi (Bungin 2008, 188-189). Dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi: tiga hal penting dalam tahapan ini yakni keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum. *Kedua*, tahap sebaran konstruksi: dasar/ prinsip dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media, sesuatu yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca. *Ketiga*, tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi berlangsung melalui: (1) konstruksi realitas membenaran; (2) kesediaan dikonstruksi oleh media massa; (3) sebagai pilihan konsumtif. *Keempat*, tahap konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.

Dalam buku Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2006, 38-39) media massa adalah sebuah sarana utama dan paling besar, bagaimana sebuah pesan dapat disampaikan secara langsung dan serentak. Media massa memiliki kemampuan tertentu dalam menciptakan citra realitas orang, benda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Media secara langsung berperan aktif dalam menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. Berita adalah proses jurnalistik, dalam dunia jurnalistik wartawan melakukan proses pencarian, penulisan, dan penyebaran berita. Sebuah

peristiwa menjadi berita bukan hanya karena kejadian itu terjadi begitu saja secara nyata, tetapi juga karena peristiwa itu dibangun menjadi informasi yang layak diberitakan oleh wartawan. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi bagi masyarakat agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Dalam media massa pun konstruksi realitas yang diberikan harus benar/sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Pada dasarnya, *audience* dari sebuah media massa akan mempercayai konstruksi realitas apa pun yang ditulis oleh media tersebut, karena itu pada prinsipnya jurnalis di setiap media sudah diatur oleh kode etik jurnalis. Salah satunya yang berhubungan dengan konstruksi realitas adalah kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.

2. Konstruksi Realitas Sosial

Pada dasarnya, proses konstruksi realitas adalah setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan atau benda, tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas. Laporan tentang kegiatan orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka guna mendengarkan pidato politik pada musim pemilu, misalnya adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang lazimnya disebut kampanye pemilu itu. Begitulah setiap hasil laporan adalah hasil konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan (Hamad 2004, 11-13).

Menurut Ritzer seperti yang dikutip oleh Burhan Bungin (2008, 11), teori yang ada dalam paradigma definisi sosial sebenarnya berpandangan bahwa manusia adalah aktor kreatif dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupannya. Hal ini pun beranggapan bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai, dimana semuanya itu tercakup dalam fakta sosial yaitu tindakan yang tergambarkan dalam struktur dan pranata sosial. Manusia pada dasarnya diberikan kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu berasal.

Secara aktif dan kreatif manusia mengembangkan dirinya melalui respon-respon terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Karena itu, paradigma definisi sosial lebih tertarik terhadap apa yang ada dalam pemikiran manusia tentang proses sosial, terutama para pengikut interaksi simbolis. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai yang menciptakan realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Sebagai makhluk berpikir yang selalu menanggapi realitas sosial yang terjadi di sekitarnya, manusia melakukan berbagai tindakan aktif. Manusia berpikir dan menanggapi realitas sosial yang terjadi disekitarnya, maka dengan pengalaman itulah manusia kemudian kembali menciptakan realita sosial dalam kehidupan sehari-harinya.

Ibnu Hamad (2004, 12) menjelaskan bahasa merupakan unsur utama yang digunakan dalam proses konstruksi sosial. Bahasa digunakan sebagai alat konseptual dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa untuk berbagai komunikasi yang dilakukan, maka tidak akan ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa.

3. Konstruksi Sosial Atas Realitas

Menurut Bungin (2008, 13) mengutip mengenai konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) yang mulai diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*, digambarkan individu secara terus menerus menciptakan sebuah realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Proses sosial yang dihasilkan pun berasal melalui tindakan dan interaksi yang dilakukan.

Sobur (2009), menjelaskan pemikiran Berger dan Luckmann mengenai realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*).

Berger dan Luckmann mengatakan, bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal,

yaitu pandangan hidupnya menyeluruh yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan (Sobur2009, 91).

Menurut Dr. Paul Suparno seperti yang dikutip Burhan Bungin (2008, 14) dalam bukunya *Konstruksi Sosial Media Massa*, ada tiga macam konstruktivisme yang berkembang di masyarakat yaitu :

Pertama, Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Dalam hal ini pengetahuan dianggap sebagai sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengalami dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri oleh yang mengalaminya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah sarana terjadinya konstruksi tersebut.

Kedua, Realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang dibentuk sampai dengan mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.

Ketiga, Konstruktivisme biasa diambil melalui konsekuensi konstruktivisme dan pengetahuan dipahami sebagai gambaran dari realitas. Pengetahuan individu dianggap merupakan gambaran yang terbentuk dari realitas objektif dalam pribadi masing-masing orang. Ketiga macam konstruktivisme ini memiliki kesamaan yaitu bahwa konstruksi sosial dilihat sebagai kerja kognitif individu untuk menafsirkan sebuah realitas yang terjadi di dunia disebabkan adanya relasi sosial yang terjalin antar individu tersebut maupun dengan lingkungan.

Berger dan Luckmann menjelaskan tiga tahap proses dialektis pemahaman terhadap suatu realitas yang disebutnya sebagai momen (Eriyanto 2002, 14-15). Tiga tahapan itu adalah:

Pertama, Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia sosialnya, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada.

Manusia berusaha menemukan dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia-dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Kedua, Objektivasi. Merupakan hasil yang diciptakan oleh manusia baik berupa fisik maupun mental dari kegiatan yang dilakukan. Hasil tersebut merupakan realitas objektif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Hasil dari eksternalisasi – kebudayaan – itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Alat dan bahasa yang diciptakan adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi sebuah realitas yang objektif.

Ketiga, Internalisasi merupakan sebuah proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu yang telah dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah menjadi objektif akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadaran manusia, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Seperti yang dikutip oleh Eriyanto (2002, 15-16) bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah namun sebuah hal yang dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Dengan pemahaman semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa realitas berwajah ganda/plural.

4. Konstruksi Realitas dan Berita

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. (Eriyanto 2002, 102).

Melvin Mencher's (2010,56) dalam bukunya berjudul *News Reporting and Writing* menerangkan bahwa definisi dari berita mungkin berubah seiring perkembangan zaman, namun ada dua pengarahan yang pasti mengenai berita yaitu :Pertama, berita adalah informasi mengenai sesuatu yang berubah mengenai sebuah peristiwa yang normal, gangguan yang tidak diharapkan dan penyimpangan dari norma yang ada. Kedua, Berita merupakan informasi yang digunakan orang-orang untuk membantu membuat keputusan tentang kehidupan mereka.

Catatan Tuchman dalam Eriyanto (2002, 109), wartawan memakai lima kategori berita. Lima kategori berita tersebut adalah :*Pertama, Hard news*, berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu. Kategori berita ini sangat ditentukan oleh waktu dan aktualitas. Ukuran keberhasilan dari kategori berita adalah dari sudut kecepatan berita disampaikan. Kategori ini ditentukan untuk melihat sejauh mana informasi tersebut cepat diterima oleh khalayak. *Kedua*, kategori berita ini berhubungan dengan kisah manusiawi (*human interest*). Pada kategori *hard news*, peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang terjadi saat itu dan dibatasi oleh waktu, maka *soft news* sebaliknya. *Soft news* dapat diberitakan kapan saja karena yang menjadi ukuran dalam kategori berita ini bukanlah informasi dan kecepatan ketika diterima oleh khalayak, melainkan apakah informasi yang disajikan kepada khalayak tersebut menyentuh emosi dan perasaan khalayak. Semakin detail informasi yang bisa digali maka akan semakin baik. *Ketiga, Spot news* adalah subklarifikasi dari berita yang berkategori *hard news*. Dalam *spot news*, peristiwa yang akan diliput tidak bisa direncanakan. Ketika wartawan menemukan peristiwa yang kiranya menarik untuk dijadikan berita maka hal tersebut dapat secara langsung diliput.

Keempat, Developing news adalah subklarifikasi lain dari *hard news*. *Developing news* pun umumnya berhubungan dengan sebuah peristiwa yang tidak terduga. Tetapi dalam *developing news* ditambahkan elemen lain, peristiwa yang diberitakan adalah bagian dari rangkaian berita yang akan diteruskan keesokan atau pada berita selanjutnya. *Kelima, Continuing news* adalah subklasifikasi lain dari *hard news*. Dalam *continuing news* peristiwa-peristiwa bisa diprediksikan dan direncanakan. Perdebatan dan peristiwa baru memang dapat ditampilkan sebagai berita pula, tetapi tetap masuk dalam tema dan bidang yang sama dengan berita yang sebelumnya.

Sebuah teks berupa berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita-berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses internalisasi. Wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. (Eriyanto 2002, 17).

Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Perbedaan antar pendekatan positivis dan konstruksionis dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan pula dalam hal bagaimana hasil kerja seorang wartawan seharusnya dinilai. Karena diandaikan ada realitas yang objektif, maka berita yang baik haruslah mencerminkan realitas tersebut.

Hal yang berbeda adalah, konsepsi konstruksionis. Berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah buku jurnalistik. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak.

Berikutnya menurut Shoemaker and Reese dalam buku *Mediating the Message Theories of Influences on Mass Media Content* (1996), terdapat banyak variabel yang mempengaruhi isi media. Faktor-faktor itu terbagi atas dua bagian besar, yaitu faktor di dalam media dan di luar media. Faktor di dalam media berkaitan dengan karakteristik individu pekerja media (komunikator) dan rutinitas yang berlangsung dalam organisasi media (*media routine*). Sedangkan faktor di luar media adalah variabel ekstramedia yang antara lain adalah sumber-sumber informasi media, pengiklan, khalayak sasaran, pemerintah atau pasar media. Sementara itu, variabel di tingkat ideologi (*worldview*) mempersoalkan berbagai sistem kepercayaan, nilai dan makna yang digunakan oleh media massa untuk menentukan isi yang ditampilkan. Shoemaker dan Reese

menyebut pengaruh-pengaruh tersebut sebagai “*hierarchy of influence*” yang merupakan lapisan-lapisan yang melingkupi institusi media tersebut, dimulai dari faktor ideologi yang merupakan sistem yang bersifat makro sampai pada yang lebih mikro, yaitu karakteristik individu pekerja media. Tiap tingkatan memiliki jangkauan tersendiri, namun tetap tunduk dan dibatasi oleh tingkatan hierarki yang lebih tinggi (Shoemaker *et al.* 1996, 33-37).

Tingkat individual yang dimaksud disini adalah wartawan sebagai pekerja media. Faktor pekerja media turut memiliki peran dalam mempengaruhi produksi isi media. Sejumlah faktor karakteristik dari pekerja, latar belakang personal dan professional atau pengalaman individual, juga nilai-nilai serta kepercayaan maupun etika yang mereka anut juga turut mempengaruhi isi media.

Rutinitas media mempunyai dampak yang besar terhadap isi media, karena rutinitas adalah lingkungan sesungguhnya dari pekerja media dan tidak dapat dipisahkan dengan pekerja media dalam melakukan pekerjaan mereka. Rutinitas diibaratkan dua sisi mata uang bagi media, satu sisi rutinitas meringankan pekerjaan media karena akan menjamin kelancaran roda organisasi media dan efisiensi, tetapi disisi lain, dia merupakan penghambat atau penghalang bagi individu pekerja media dalam melaksanakan tugas karena adanya keterbatasan dalam pilihan dan keleluasaan penulisan dan pembuatan berita. Rutinitas dalam media biasanya berkaitan dengan kegiatan seleksi yang dilakukan wartawan yang menjalankan fungsinya sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang). Tugas *gatekeeper* adalah memilih sedemikian banyak berita yang masuk dimuat pada halaman tertentu. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah adanya deadline dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan space untuk menyajikan berita.

Pada level organisasi media seperti peranan yang diemban pekerja media, struktur dan bentuk dari organisasi serta tujuan utama dari organisasi media yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap produksi media. Selain itu, kekuasaan organisasi media terletak pada pemilikinya. Sebagai pihak yang menentukan dan mendorong pelaksanaan kebijakannya, pemilik modal memiliki pengaruh yang besar terhadap produksi berita.

Tingkat ekstra media berkaitan dengan faktor lingkungan di luar media yang sedikit banyak akan mempengaruhi pemberitaan media. Shoemaker dan Reese menjelaskan bahwa faktor ekstramedia yang mempengaruhi isi media berkaitan dengan beberapa hal, yaitu sumber-sumber berita, kelompok kepentingan tertentu, pemasangan iklan dan khalayak, pengawasan dari pemerintah berupa peraturan-peraturan pers, pasar dan lingkungan media serta teknologi.

Shoemaker dan Reese, menjelaskan media memiliki cara sendiri ketika menyajikan suatu realitas. Peristiwa yang sama akan dimaknai dan disajikan secara berbeda, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda pula. Hal ini berkaitan erat dengan ideologi yang dimiliki oleh sebuah media sehingga Shoemaker dan Reese mengkategorikan hal ini dalam tingkat ideologi media dalam hierarki pengaruh. Apa yang telah disebutkan oleh Shoemaker dan Reese pada tingkat level bahwa media melalui level pertama kali dalam melakukan pembingkai dan mengkonstruksi realitas sesuai dengan kacamata mereka. Lalu kemudian menggunakan bahasa sebagai alat bertutur, bercerita dan membuat berita yang kemudian hendak diberitakan oleh media nantinya.

5. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif/paradigma konstruktivis. Eriyanto (2002, 32), mengatakan, pendekatan konstruksionis yang ada pada analisis *framing* akan mencakup aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu dari pemberitaan yang ada. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya berdasarkan apa yang dia lihat namun berdasarkan etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu yang umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu. Hal ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. Wartawan dalam hal ini bukan hanya sebagai pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas publik. Oleh karena fungsinya tersebut, maka wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi juga mengkonstruksi peristiwa melalui dirinya sendiri dengan realitas yang diamatinya.

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Jadi setiap media massa dapat berbeda-beda dalam

mengkonstruksikan isu yang terjadi. Karenanya, konsentrasi analisis paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk (Eriyanto 2002, 11). Elemen Framing Robert Entmant dipakai sebagai perangkat pengumpulan data pada penelitian ini. Entmant (menjelaskan bahwa ada empat element utama yang diikhtisarkan dalam tabel di bawah ini :¹

Elemen framing	Temuan
Problem identification	Masalah dibingkai sebagai apa
Diagnoses causes	Logika sebab akibat terkait masalah tersebut
Make moral judgement	Nilai nilai moral apa yang ditonjolkan media
Solution	Solusi apa yang di tonjolkan dalam bingkai berita

Robert Entmant secara spesifik mengarahkan framing pada tujuan menganalisis proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi yang lain.

6. Hasil Penelitian

a. Konstruksi peran KPK pada www.tribunnews.com

Judul	Abraham Samad Kecewa Ratu Atut Cuma Divonis Empat Tahun	
Website /URL	http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/02/Abraham-Samad-kecew...	
Diunduh : 4 September 2014	Tanggal pemberitaan : 2 September 2014	
Elemen framing	Temuan	Keterangan dan interpretasi
Problem identification	Judul “ Abraham Samad Kecewa Ratu Atut Cuma Divonis Empat Tahun ”	KPK gagal tuntutan atut berita menonjolkan kegagalan KPK dengan mengutip pernyataan Abraham Samad (ditemukan kata kecewa sehingga banding dianggap sebagai kekecewaan). Dimana ini sebenarnya merupakan relasi antara KPK dan vonis hukuman Atut yang dinilai tidak proporsional untuk tingkat kriminalitasnya sehingga bisa dilihat penonjolan relasi ini sebagai sebuah usaha menaikkan kegagalan KPK atau kalahnya KPK dari Atut sebagai frame pemerintah atau penguasa
Diagnoses causes	P6 “sebelumnya jaksa menuntut Atut.....10 tahun penjara...”	Penyebab banding dan kekecewaan Samad atau kegagalan KPK ini adalah tuntutan jaksa yang tidak terpenuhi

¹Balaban, Delia Cristina, *The Framing or the Interpretation Frames Theory*, *Journal of Media Research*, 2/2008 pp. 9-13

Make moral judgement	P2 “ya pasti ada kekecewaan....kita tuangkan dalam bentuk hukum...”	Bahwa kekecewaan atau kegagalan KPK harus tetap pada koridor hukum dimana atau harus diganjar berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan proses hukum sah
Solution	P5 ”masih ada dua kasus lagi...dan akan menjurus ke sana”	Langkah KPK tidak berhenti di persidangan atau vonis ini tetapi beberapa kasus yang lain akan menjadi jaring buat Atut

Peran KPK dikonstruksikan oleh Tribun News dalam konteks bahwa KPK adalah pihak yang kalah. Media mengkonstruksi sebuah ide bahwa ada pertarungan antara pemerintah dalam hal ini penguasa (Atut) dengan jajaran hakim. Dan KPK sebagai sebuah badan yang berargumentasi dengan mereka. Dalam hal ini peran KPK lebih kepada sebuah lembaga yang marginal. Kekecewaan menjadi marking frame terkait bingkai permasalahan naik banding ini. Dimana kekecewaan berarti ada sebuah kekalahan.

Dari segi problem identification terlihat penonjolan pada banding sebagai bentuk ekspresi kekalahan dari KPK. Namun, disini ekspresinya bisa berarti frame positif atau negatif jika melihat dari segi kausal maka kekalahan KPK disebabkan oleh keputusan hakim sebagai wakil pemerintah (Atut pun organ penguasa pemerintah). Dimana penonjolan KPK sebagai lembaga “kecil” dan pengadilan sebagai lembaga “besar” sebagai representasi pemerintah memberikan bingkai bahwa penyebab KPK kalah adalah kuasa pemerintah. Dimana frame KPK sebagai lembaga yang single fighter dikalahkan oleh pengadilan regular dibawah konstelasi kekuasaan pemerintah. Media jelas menggambarkan itu dalam frame dengan membrikan logika bingkai KPK tidak mampu melawan kekuasaan itu sendiri.

Moral yang coba ditonjolkan dalam pemberitaan ini adalah gelanggalang hukum sebagai gelanggalang eksistensi Negara menjadi frame moral. Dimana KPK sebagai Lembaga Negara akhirnya menyerah pada moral ”hukum Negara” yang merupakan sebuah derivasi dari institusi penguasa. Yang ini coba dibingkai sebagai hukum namun ini lebih mengacu pada konstruksi kepatuhan KPK kepada jalur Negara dan seolah-olah ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan keras, tertahankan oleh bingkai hukum. Dikonstruksikan sebagai badan yang berada pada koridor status quo.

Solusi yang ditawarkan adalah melanjutkan perkara yang ada. Disini KPK digambarkan sebagai seorang pemain yang kalah dan harus bertanding pada klasemen lain. Ini menunjukkan bingkai konstruksi KPK sebagai lembaga yang bermain sendiri. Berlawanan dengan lembaga hukum formal lain. Dan seperti sebuah lapangan bola, maka konstruksi KPK hanya sebuah team kesebelasan kecil, baru dan bertarung dengan team yang lebih matang dan penuh konspiratif.

b. Konstruksi peran KPK pada www.kompas.com

Judul	Kecewa Vonis Atut, KPK ajukan banding	
Website/URL	http://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/14531501/Kecewa.Vonis.At...	
Diunduh : 4 September 2014	Tanggal pemberitaan : 2 September 2014	
Elemen framing	Temuan	Keterangan dan interpretasi

Problem identification	Judul “Kecewa Vonis Atut, KPK ajukan banding”	Masalah banding di frame sebagai bentuk kekecewaan KPK, ini sebenarnya menggambarkan peran KPK yang gagal menarik Atut pada tuntutan hukumnya, KPK dibingkai sebagai institusi yang tidak puas dan kalah dalam memerangi korupsi
Diagnoses causes	P3 “...terkait salah satu hakim...yang berpendapat Atut semestinya di vonis bebas...”	Bahwa kegagalan vonis yang dituntut KPK berasal dari konstelasi pertimbangan hakim. Yang artinya, peran KPK sebagai pemberantas korupsi ditonjolkan sebagai second justice dan masih bisa dikalahkan oleh konstelasi elite (hakim) itu sendiri. KPK ditonjolkan sebagai single fighter penegak hukum yang beraktifitas bersimpangan dengan penegak hukum penguasa
Make moral judgement	P5 “Atut dituntut hukuman 10 tahun penjara dan...” P2 “...pasti ada kekecewaan tetapi akan dituangkan dalam bentuk hukum...”	Media ingin menonjolkan sebuah moral judgement tentang koruptor seharusnya dihukum lama. Artinya, hukuman Atut dianggap tidak benar dan diluar keharusan menurut kalimat ini. Dan penyelesaian ataupun semuanya akan dikejar melalui hukum
Solution	P4 “tidak perlu khawatir itu baru satu kasus	Bahwa kedepan KPK akan menjerat Atut dengan kasus yang lainnya, media masih membrikan sebuah jalan keluar agar KPK terus mengusut

Dari segi problem indentification, diframe sebagai pihak yang gagal. KPK dikalahkan oleh sebuah pihak yang dinilai sebagai sebuah institusi besar yang coba ia lawan. Atut adalah bagian dari pemerintahan, sama seperti hakim. Frame tentang pihak yang gagag ini memberikan sebuah gambaran atau bingkai bahwa KPK tidak mampu menyentuh orang-orang tertentu atau elite tertentu. Peran KPK sebagai penegak hukum masih merupakan second opinion atau bukan penegak hukum utama. Dengan organ yang begitu dimusuhi oleh banyak pihak (yang mendukung status quo).

Dari segi kausalitas, KPK masih dianggap sebagai institusi penegakan hukum yang lemah, dimana masih ada kekuatan lain di Negara ini yang dikuasai elite yang mampu menyetir keadilan.

KPK hanyalah second class justice apparatus, yang hanya ada untuk memenuhi syarat demokrasi atau suatu bentuk image tentang demokrasi. Kekuatan hakim yang menyatakan Atut tidak bisa dihukum adalah satu-satunya frame kasual yang menyebabkan kekecewaan atau kegagalan KPK. Ini menunjukkan adanya suatu dikotomi KPK dengan penegak hukum lain yang tergabung dalam aparat pemerintah atau penguasa. Sehingga KPK adalah single player dan sebagai lembaga yang anti elitis, yang artinya KPK berperan sebagai rival elite politik di Indonesia.

Jalur hukum sebagai moral utama keadilan adalah sebuah bingkai yang menonjolkan sebuah formalitas tertentu, sebuah alasan pemaaf. Yang sebenarnya lebih dikonstruksikan sebagai kekalahan. Karena di Indonesia kerja KPK adalah mengkritik aparat hukum dan berlawanan dengan sistem. Sehingga jalur hukum sebagai sebuah moral bisa diartikan sebagai jalur harapan setelah kalah. Yang artinya ini adalah sebuah formalitas perlawanan.

Solusi yang ditawarkan media lebih kepada penuntutan kasus selanjutnya, dimana disini KPK dituntut untuk maju terus. Peran KPK sebagai harapan atas perjuangan anti korupsi masih ada. Ini menunjukkan media menonjolkan sebuah penyelesaian agar formal saja, seperti sebuah urutan yang biasa, bukan tindakan kritis. Sehingga media cenderung mengarah pada penyelesaian procedural, bukan pada sebuah peradilan yang harus digugat sebagai bentuk kritisi pada penegakan hukum.

c. Konstruksi peran KPK dalam www.Jawapos.com

Judul	KPK : Vonis Atut Terlalu Ringan	
Website/URL	http://www.jawapos.com/baca/artikel/6527/KPK-Vonis-Atut-Terlalu-Ringan-	
Diunduh : 4 September 2014	Tanggal pemberitaan : 1 September 2014	
Elemen Framing	Temuan	Keterangan dan Interpretasi
Problem identification	P1 “meskipun jaksa penuntut umum masih pikir-pikir...pimpinanKPK menyatakan putusan layak banding...Atut dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia...” Judul...KPK : Vonis Atut Terlalu Ringan	Banding dilihat sebagai perlawanan KPK terhadap Atut.KPK sebagai institusi layak melakukan perlawanan
Diagnoses causes	P2”wakil ketua KPK Busyro Muqodas...jaksa layak untuk banding karena Atut telah menodai demokrasi...”	Media menonjolkan sebab akibat dalam kerangka bahwa KPK wajib banding.Banding dilakukan karena adanya usaha menodai demokrasi
Make moral judgement	“...banyak dakwaan yang tidak dapat dibuktikan jaksa...” P2 ”wakil ketua KPK Busyro Muqodas...jaksa layak untuk banding karena Atut telah menodai demokrasi...”	Moral judgement menunjukkan penonjolan bahwa bukti yang tak cukup menyebabkan seseorang bisa dilepas. Demokrasi sebagai moral universal
Solution	P1 “meskipun jaksa penuntut umum masih pikir-pikir...pimpinanKPK menyatakan putusan layak banding...Atut dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia...”	Banding sebagai solusi

Media mbingkai masalah dalam konteks banding sebagai usaha perlawanan. Jawa Pos mbingkai peran KPK sebagai organisasi yang militan, yang harus bekerja menegakkan hukum dengan segala jalan. Yang artinya demokrasi dan nilai-nilai keadilan menjadi bingkai masalah, bukan reduksi keadilan pada putusan hukum saja. Sehingga peran KPK adalah sebagai sebuah alternativeadilan ketimbang sebuah lembaga yang sedang melakukan argumentasinya dalam proses hukum tertentu.

Logika kausalitas terhadap masalah lebih mengedepankan alasan banding atau alasan perlawanan, bukan hanya pada batas hukum tapi meluas pada nilai-nilai moral yang lebih universal. Dimana disini kausalitas perlawanan bukan karena putusan hukum, tetapi karena bingkai demokrasi sebagai nilai-nilai formal dan nonformal, sebagai nilai fundamental. Media dalam hal ini, meletakkan peran KPK dalam sebuah frame nilai universal ketimbang nilai hukum formal dan positif semata.

Moral yang diangkat adalah perjuangan hukum harus dengan fakta. Bukti-bukti yang tak kuat mungkin saja menterbalikkan keadaan. Hanya saja moral demokrasi tetap harus dijunjung. Ada dua frame moral yang coba ditampilkan yaitu frame hukum dan fakta positif, dan frame nilai-nilai universal. Namun media dominan dibuka atau dibingkai dalam koridor universal ketimbang aturan hukum semata.

Solusi yang dikonstruksi dalam bingkai berita terkait putusan banding sebagai usaha demokratis yang direkomendasikan untuk KPK. Bukan usaha hukum sebagai proses formal hukum itu sendiri. Dimana solusi ini lebih mencerminkan sebuah konstruksi, seolah-olah KPK adalah *single fighter* yang militan. Pilihan atau solusi yang diberi adalah sebuah bingkai yang lebih menyarankan kepada arah atau nuansa militansi dalam penegakan hukum, bukan sebuah usaha menjalani hukum dan proses formal belaka.

7. Diskusi

a. Konstruksi Bingkai Militansi KPK

Bingkai ini terkonstruksi oleh bagaimana berita lebih memberikan bingkai KPK sebagai institusi yang melawan badan hukum pemerintah, baik Atut ataupun pengadilan adalah dua organ pemerintah atau penguasa. Disini frame militansi mewarnai peran KPK sebagai badan atau komisi pengawas yang wewenangnya secara umum memandang pemerintah dari luar tubuh pemerintah, atau memandang elite dari luar tubuhnya dan bukan bagian dari aparat elite sendiri. Seperti kita ketahui Polri, TNI, dan pengadilan banyak berkerja dibawah nomenklatur penguasa.

Meskipun terdapat perbedaan konstruksi bingkai, namun ketiga media diatas cenderung menampilkan peran KPK sebagai lembaga hukum alternative, sebagai pemain diluar gelanggang yang cenderung bertempur sendiri, bahkan melawan wasit (hakim) sekalipun. KPK dibingkai sebagai sebuah organisasi yang bergerak bukan dalam koridor proses hukum tapi dalam bingkai hukum dalam nilai-nilai universal demokrasi.

Sebagai sebuah institusi hukum terkait proses, maka KPK didorong sebagai “pemain dalam” pada konstelasi hukum ini, namun bingkai media justru melihat atau mengkonstruksi peran KPK sebagai lembaga alternatif hukum yang bukan semata hukum formal, tetapi lebih kepada universalitas nilai, sehingga ia bisa saja menjadi sebuah lembaga anti elite.

b. Konstruksi Bingkai KPK sebagai Organisasi Anti Elitis

Bahasa kekecewaan adalah bahasa emosional. Bingkai emosional ini biasanya mendorong sesuatu keluar dari ruang atau aturan tertentu. Dalam berita di ketiga media diatas, terlihat bingkai-bingkai nilai demokrasi, dan “penuntutan kembali”, dan “kekecewaan dituang dalam bentuk hukum”. Ini menunjukan KPK sebagai sebuah organisasi yang dibingkai tidak puas dengan hukum yang berlaku. Dilaur kehendak pemerintah dan elite. Sehingga KPK terkesan anti elitis. Ini terlihat bagaimana Atut yang dibingkai sebagai pesakitan yang lebih banyak, tidak bisa dituntut karena formal dan faktual hukum. Dimana Atut adalah representasi dari elite yang menguasai hukum terutama dalam pengadilan. Media sendiri tampaknya tidak terlalu mengambil sudut tendensius pada hakim peradilan dan Atut. Tetapi justru bingkai-bingkai spesifik tentang KPK. Jelas ini dibuat dengan konstruksi KPK sebagai lembaga hukum alternatif non-elitis vs peradilan/Atut sebagai institusi elite.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian, dapat dilihat dua konstruksi utama dalam ketiga berita online, pertama konstruksi bingkai militansi KPK, peran KPK sebagai opsi oposisi terhadap kekuatan penguasa atau pemerintah yang bergerak tidak pada nilai proses hukum tetapi pada nilai-nilai universal demokrasi. Kedua, konstruksi bingkai KPK sebagai organisasi anti elitis, ini merupakan konstruksi peran KPK sebagai bentuk perlawanannya kepada korupsi yang memang merupakan perilaku elite. Atut sebagai bagian dari elite merupakan “lawan” dari KPK dan pembelaannya terlihat dibingkai

sebagai sebuah kegagalan KPK melawan kekuatan elite baik atau dan hakim sebagai representasi dari pemerintah atau elite.

Saran

Secara teoritis perlu dilakukan kajian wacana lebih dalam terkait pemberitaan tentang KPK, mengingat kasus yang banyak dan bergulir. Secara praktis bahwa media sebaiknya memberikan pemberitaan yang mendukung kebenaran. Dimana pemberitaan tentang korupsi jangan dijadikan sebuah konstruksi elitis ataupun konstruksi yang membangun opini tertentu yang menonjolkan sisi berlawanan dengan pengakuan hukum atau keadilan universal.

Daftar Pustaka

Buku

- Berger, Peter L & Luckmann, Thomas. (1979). *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Great Britain : Penguin Books
- Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kovach, Bill & Rosentiel, Tom. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media: Surat Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Mencher's, Melvin. (2011). *The News Reporting and Writing*. New York: Mc Graw-Hill.
- Shoemaker, Pamela & Stephen J., Reese. (1996). *Mediating The Message Theories of Influence on Mass Media Content, second edition*. New York: Longman.
- Kovach, Bill & Rosentiel. Tom. (2004). *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

TEORI-TEORI CONTAGION (TEORI PENULARAN)

Teori ini menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang ada dalam sikap dan perilaku anggota masyarakat.

Sejarah dan Tujuan

Teori-teori Contagion berusaha untuk menjelaskan mengenai jaringan sebagai saluran untuk “menularkan” sikap dan perilaku. Teori-teori Contagion berkaitan dengan sejumlah teori, diantaranya Teori Strukturasi, Interaksi Simbolik, Teori Palang-Pintu (*Gatekeeping Theory*), Analisis dan teori jaringan, dan Teori Jarum Suntik (*Hypodermic Needle Theory*). Teori-teori tersebut seluruhnya fokus pada aspek-aspek yang berbeda dalam proses konstruksi sosial.

Asumsi Dasar dan Pernyataan

Dalam Teori-teori Contagion, hubungan terdapat dalam jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi tersebut berfungsi sebagai suatu mekanisme yang mengekspos orang, kelompok-kelompok, dan organisasi ke arah informasi, pesan yang ada di dalam sikap, serta perilaku orang lain (Burt, 1980, 1987; Contractor & Eisenberg, 1990). Dikarenakan ekspos tersebut akan meningkatkan kemungkinan jaringan yang ada dalam anggota masyarakat, maka anggota masyarakat akan mengembangkan kepercayaan, asumsi, dan sikap yang sama didalam jaringannya tersebut (Carley, 1991; Carley & Kaufer, 1993).

Teori-teori Contagion berusaha melihat hubungan antara anggota organisasi dengan jaringannya. Pengetahuan, sikap, dan perilaku anggota organisasi berhubungan dengan informasi, sikap, dan perilaku anggota jaringan lain yang ada di dalam jaringan tersebut.

Faktor-faktor lain yang ada dalam jaringan seperti frekuensi, kemajemukan, kekuatan, dan kesenjangan dapat membentuk sejauh mana pengaruh orang lain terhadap individu tertentu yang ada di dalam jaringannya (Erickson, 1988).

Contagion dapat dibedakan menjadi Contagion berdasarkan kohesi dan Contagion berdasarkan kesamaan struktur (Burkhardt, 1994). Contagion berdasarkan kohesi merujuk pada pengaruh dari orang-orang yang melakukan komunikasi secara langsung. Persepsi individu-individu tersebut mengenai kepercayaan diri untuk menggunakan teknologi baru secara signifikan dipengaruhi oleh orang-orang yang melakukan komunikasi secara langsung dengan mereka. Selanjutnya, Contagion berdasarkan kesamaan struktur merujuk pada pengaruh dari orang-orang yang melakukan pola komunikasi yang sama.

Secara umum, sikap dan penggunaan teknologi baru para individu tersebut lebih dipengaruhi oleh orang-orang yang melakukan pola komunikasi yang sama dengan mereka.